

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI  
PERKOTAAN (PNPM-MP) PADA LEMBAGA KESWADAYAAN  
MASYARAKAT (LKM) KECAMATAN ILIR  
TIMUR 2 PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Aldila Ira Meutia**

**NIM : 22.2011.252**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2015**

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI  
PERKOTAAN (PNPM-MP) PADA LEMBAGA KESWADAYAAN  
MASYARAKAT (LKM) KECAMATAN ILIR  
TIMUR 2 PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**Nama : Aldila Ira Meutia**

**NIM : 22.2011.252**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2015**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aldila Ira Meutia

Nim : 22 2011 252

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan konsekuensinya.

Palembang, 2015

Yang membuat pernyataan,

METERAI  
TEMPEL



DC00EADF360446358

6000  
ENAM RIBU RUPIAH



  
Aldila Ira Meutia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul** : Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang

**Nama** : Aldila Ira Meutia  
**NIM** : 22 2011 252  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Mata Kuliah Pokok** : Akuntansi Sektor Publik

**Diterima dan Disahkan**  
**Pada Tanggal.....** 2/9/2015

**Pembimbing,**



**(Welly, SE., M.Si)**

**NIDN/NBM : 0212128101/1085022**

**Mengetahui,**

**Dekan**

**u.b. Ketua Program Studi Akuntansi**



**(Rosalina Ghozali, SE., Ak. M.Si)**

**NIDN/NBM : 0228115802/1021961**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- *Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar* (Al-Baqarah: 153)
- *Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya* (Ali Bin Abi Thalib)
- *Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh*

### *Ku persembahkan kepada :*

- *PAPA (Drs. Abdul Ajis) dan MAMA (Indra Rjvita S.H) tercinta*
- *Adikku (Dwiki Novinda) tersayang*
- *Sahabatku (Randa) tersayang*
- *Dosen Pembimbingku Ibu Welly S.E M.Si*
- *Teman-teman Seperjuanganku*
- *Almamater tercinta*

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PRAKATA

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang”.

Penerapan prinsip akuntabilitas harus ditaati secara konsisten oleh semua pelaku PNPM-MP Mandiri Perkotaan tanpa terkecuali. Akuntabilitas ini pada dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan baik di tingkat program, daerah dan masyarakat. Selain wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan serta keuangan, PNPM-MP Mandiri Perkotaan juga wajib melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip transparansi. Transparansi dalam pelaksanaan PNPM-MP Mandiri Perkotaan dapat di terapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan ataupun membutuhkan untuk mengetahui informasi-informasi mengenai konsep PNPM-MP Mandiri Perkotaan, kebijakan serta pengambilan keputusan, perkembangan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari para

pelaku PNPM-MP Mandiri Perkotaan baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat.

Pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Seperti LKM Duku dan LKM Ampera yang belum sepenuhnya melaksanakan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam mengelola LKM, tetapi untuk LKM Usaha Bersama semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).

Oleh karena itu penulis melakukan penelitian untuk mengkaji pengelolaan dana yang ada di LKM Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Adapun penulisan laporan penelitiannya dibagi menjadi lima Bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama pada kedua orangtuaku dan saudara-saudaraku yang telah mendidik dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosalina Ghazali S.E, Ak., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi dan Ibu Welly S.E, M.Si sebagai Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan

memberikan motivasi kepada penulis tentang arti kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis juga dengan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. H. M. Idris, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi
4. Ibu Welly, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbingku.
5. Bapak Mizan S.E., Ak., M.Si selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Pimpinan beserta Staf dan karyawan-karyawati Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang serta LKM Usaha Bersama, LKM Duku, dan LKM Ampera.
8. Pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis berupa materil dan spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Palembang,.....2015

Penulis

**Aldila Ira Meutia**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN DEPAN/COVER.....</b>	i
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	v
<b>HALAMAN PRAKATA.....</b>	vi
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL.....</b>	xii
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....</b>	xiii
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xiv
<b>ABSTRAK.....</b>	xv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Sebelumnya.....	12
B. Landasan Teori.....	17
1. Akuntabilitas.....	17

2. Transparansi .....	18
3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) .....	24
4. Pendanaan.....	29

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Operasionalisasi Variabel .....	36
D. Data Yang Diperlukan .....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	40

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	43
1. Sejarah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) .....	43
2. Gambaran Umum Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang .....	45
3. Visi, Misi Prinsip Maksud dan Tujuan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang .....	47
4. Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Jabatan .....	49
5. Aktivitas di LKM Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang ....	59

6. Produk di LKM Usaha Bersama Kelurahan 2 Ilir .....	60
7. Produk di LKM Duku Kelurahan Duku .....	60
8. Produk di LKM Ampera Kelurahan 3 Ilir .....	61
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	62
1. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) Mandiri Perkotaan Pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang .....	62
2. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) Mandiri Perkotaan Pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang .....	70

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	80

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel I.1	Daftar Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pada LKM Duku, Ampera, Usaha Bersama .....	4
Tabel I.2	Alokasi Penggunaan Dana Pada LKM Duku, Ampera, Usaha Bersama .....	5
Tabel I.3	Selisih Antara Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi Penggunaan Dana Pada LKM Duku, Ampera, Usaha Bersama .....	5
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	16
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel .....	36

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Usaha Bersama Kelurahan 2 Ilir .....	51
Gambar IV.2 Struktur Organisasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Duku Kelurahan Duku .....	52
Gambar IV.3 Struktur Organisasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Ampera Kelurahan 3 Ilir .....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 : Fotocopy Aktifitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Fotocopy Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi
- Lampiran 4 : Fotocopy Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian
- Lampiran 5 : Fotocopy Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an
- Lampiran 6 : Fotocopy Sertifikat TOEFL
- Lampiran 7 : Fotocopy Sertifikat KKN (Kuliah Kerja Nyata)
- Lampiran 8 : Fotocopy Sertifikat Komputer
- Lampiran 9 : Biodata Penulis

## ABSTRAK

**Aldila Ira Meutia/222011252/2015/Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang/Akuntansi Sektor Publik.**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Seperti LKM Duku dan LKM Ampera yang belum sepenuhnya melaksanakan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam mengelola LKM, tetapi untuk LKM Usaha Bersama semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).

**Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, PNPM-MP, dan Pengelolaan Dana**

## ABSTRACT

***Aldila Ira Meutia / 222011252/2015 / Analysis Accountability and Transparency Fund Management of the National Program for Community Empowerment Urban (PNPM-MP) on Community Self-Supporting Institution (MFI) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang/Accounting Sector Public.***

*Formulation of the problem in this research is How the accountability and transparency of the management of the funds of the National Program for Community Empowerment Urban (PNPM-MP) on Community Self-Supporting Institution (MFI) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. The purpose of this study is to clarify accountability and transparency in the management of funds of the National Program of Urban Community Empowerment (PNPM-MP) on Community Self-Supporting Institution (MFI) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. This type of research is a descriptive study. The data used are primary data and secondary data. Methods of data collection by using interviews and documentation. Data analysis methods to be used in this research is qualitative analysis. The results showed that the implementation of Accountability and Transparency Fund Management of the National Program for Community Empowerment Urban (PNPM-MP) on Community Self-Supporting Institution (MFI) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, has not been fully implemented either. Such as MFI and MFI Duku Ampera is not yet fully implement the principles of accountability and transparency in managing the MFI, the MFI Joint Venture but for all the activities carried out by using the principles of accountability and transparency in accordance with the Guidelines for Implementation of the National Program for the Urban Community Empowerment (PNPM-MP).*

***Keywords: Accountability, Transparency, PNPM-MP, and Fund Management***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri yang dikeluarkan per Agustus 2009, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan akan meliputi 4.805 kecamatan di 32 provinsi atau mencapai 75,9% dari total lokasi PNPM Mandiri. Melalui PNPM Mandiri, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak diharapkan dapat dilaksanakan secara berenergi dan lebih terarah pada kelompok masyarakat miskin dan wilayah tertinggal ([www.pnpmmandiri.org](http://www.pnpmmandiri.org)). Tingkat penyimpanan dana PNPM Mandiri selama 2011 mencapai 0,8% atau Rp. 250 miliar, dari total penyaluran Rp. 11,2 triliun ([inilahjabar.com](http://inilahjabar.com)).

Hal menarik yang perlu disadari adalah terfokus pada cara meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam lembaga sektor publik termasuk di dalamnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). LKM bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan pada umumnya. LKM ini dipilih oleh pemerintah karena keberadaan lembaga ini yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, lebih tepatnya berada di setiap kelurahan. Pelaporan pengelolaan dan PNPM Mandiri yang akuntabel dan transparan merupakan kewajiban bagi LKM, karena dana yang diterima merupakan dana dari pemerintah sehingga didalam pengelolaannya harus bisa dipertanggungjawabkan pada publik secara transparan demi suksesnya program PNPM Mandiri serta terciptanya akuntabilitas publik.

Penerapan prinsip akuntabilitas harus ditaati secara konsisten oleh semua pelaku PNPM-MP Mandiri Perkotaan tanpa terkecuali. Akuntabilitas ini pada dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan baik di tingkat program, daerah dan masyarakat. Selain wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan serta keuangan, PNPM Mandiri juga wajib melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip transparansi. Transparansi

dalam pelaksanaan PNPM Mandiri dapat di terapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan ataupun membutuhkan untuk mengetahui informasi-informasi mengenai konsep PNPM Mandiri, kebijakan serta pengambilan keputusan, perkembangan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari para pelaku PNPM Mandiri baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat.

Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp.750 juta sampai Rp.3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. Jumlah penduduk kelurahan 2 Ilir sebanyak 21.180 jiwa, Jumlah penduduk kelurahan Duku sebanyak 16.628 jiwa, dan Jumlah penduduk kelurahan 3 Ilir sebanyak 19.212 jiwa. Kecamatan Ilir timur 2 berada di jln. Yos Sudarso. Kecamatan Ilir timur 2 merupakan salah satu kecamatan yang berada di kota Palembang. Beberapa LKM yang terdapat didaerah tersebut menjadi salah satu daftar lokasi sasaran PNPM Mandiri.

Kota Palembang terdiri dari 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Disetiap masing-masing kelurahan mempunyai BKM/LKM dengan total BKM/LKM diseluruh Kota Palembang berjumlah 107 BKM/LKM. Salah satunya adalah LKM Usaha Bersama yang terdapat di Kelurahan 2 Ilir,

LKM Duku yang terdapat di Kelurahan Duku dan LKM Ampera yang terdapat di Kelurahan 3 Ilir Palembang, LKM ini didirikan Tahun 2007. Adapun jumlah alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diterima LKM ini berbeda-beda.

**Tabel I.1**  
**Daftar Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)**  
**Pada LKM Duku, Ampera, Usaha Bersama**  
**Tahun 2012-2014**

Tahun	Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)		
	Duku	Ampera	Usaha Bersama
2012	Rp. 100.000.000	Rp. 83.000.000	Rp. 100.000.000
2013	Rp. 75.000.000	Rp. 83.000.000	Rp. 75.000.000
2014	Rp. 75.000.000	Rp. 83.000.000	Rp. 75.000.000
Total	Rp. 250.000.000	Rp. 249.000.000	Rp. 250.000.000

Sumber : LKM Usaha Bersama, Duku, Ampera, 2015

Berdasarkan dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, untuk LKM Duku dan Ampera pada tahun 2012 ke tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2013 ke 2014 Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diterima tetap tidak ada perubahan, untuk LKM Ampera pada tahun 2012, 2013, 2014 Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diterima tetap untuk setiap tahunnya.

**Tabel I.2**  
**Alokasi Penggunaan Dana**  
**Pada LKM Duku, Ampera, Usaha Bersama**  
**Tahun 2012-2014**

Tahun	Alokasi Penggunaan Dana		
	Duku	Ampera	Usaha Bersama
2012	Rp. 90.000.000	Rp. 70.000.000	Rp. 100.000.000
2013	Rp. 60.000.000	Rp. 70.000.000	Rp. 75.000.000
2014	Rp. 60.000.000	Rp. 70.000.000	Rp. 75.000.000
Total	Rp. 210.000.000	Rp. 210.000.000	Rp. 250.000.000

Sumber : LKM Usaha Bersama, Duku, Ampera, 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa, Alokasi Penggunaan Dana untuk LKM Duku dan Ampera Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan pengalokasiannya terdapat perbedaan, sedangkan untuk LKM Usaha Bersama Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maupun pengalokasiannya telah dilakukan dengan benar.

**Tabel I.3**  
**Selisih Antara Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)**  
**Dan Alokasi Penggunaan Dana Pada LKM Duku, Ampera,**  
**Usaha Bersama Tahun 2012-2014**

Tahun	Selisih		
	Duku	Ampera	Usaha Bersama
2012	Rp. 10.000.000	Rp. 13.000.000	Rp. 0
2013	Rp. 15.000.000	Rp. 13.000.000	Rp. 0
2014	Rp. 15.000.000	Rp. 13.000.000	Rp. 0
Total	Rp. 40.000.000	Rp. 39.000.000	Rp. 0

Sumber : LKM Usaha Bersama, Duku, Ampera, 2015

Berdasarkan dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, untuk LKM Duku, dan Ampera terdapat selisih yang cukup drastis, karena Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan pengalokasiannya belum dilakukan dengan benar, sedangkan untuk LKM Usaha Bersama tidak mengalami

selisih, karena LKM ini melakukan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan pengalokasiannya secara benar.

Kesimpulan dari tabel diatas dapat di lihat bahwa setiap Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) menerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maupun Penggunaan dananya berbeda-beda tergantung dengan proyek yang akan di kerjakan.

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Usaha Bersama, Duku, dan Ampera ini mempunyai program tridaya terpadu meliputi bidang Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial. Bidang Ekonomi LKM Usaha Bersama, Duku, Ampera mempunyai program ekonomi bergulir yang berupa pinjaman untuk masyarakat. Yang membedakannya ialah jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), besaran pinjaman bergulir dan perhitungan jasanya.

Bidang Lingkungan LKM Usaha Bersama Kelurahan 2 Ilir Palembang yang memiliki 5 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), LKM Duku memiliki 3 KSM, dan Ampera memiliki 48 KSM melakukan kegiatan pembangunan jalan rabat beton, pembangunan sarana MCK, pembangunan jembatan, gorong-gorong (Parit Jalan), pembangunan drainase, yang membedakan hanya jumlah Rukun Tetangga (RT). Untuk LKM ampera ada tempat-tempat tertentu yang tidak bisa di beri bantuan PNPM seperti, Komplek polisi, Asrama Zidam (TNI), dan Komplek PLN. Biaya pembangunan jalan Rabat Beton, Pembangunan MCK, Pembangunan Jembatan dan Gorong-gorong, Pembangunan Drainase, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Dirjen

Cipta Karya Kementerian PU, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang, sebagai mana termasuk dalam pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan.

Bidang Sosial untuk LKM Duku dan Ampera melakukan program yang sama yaitu, pembagian gratis seragam baju SD, SMP, SMA, lansia, dan poging. Jumlah KSM tergantung banyaknya kegiatan. LKM Usaha Bersama belum mempunyai program untuk di bidang sosial.

Penelitian yang telah dilakukan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi lembaga publik, dilakukan oleh Vivi (2012) meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana PNPM Mandiri (Studi Pada BKM Betul Kota Malang), diperoleh hasil bahwa 13 indikator akuntabilitas yang menjadi kondisi ideal, terdapat 10 indikator akuntabilitas yang terpenuhi, sehingga presentasi yang diperoleh yaitu 77%, yang artinya bahwa kondisi ini masuk dalam interval yang ke-4 yaitu akuntabel. Pada indikator transparansi yang menjadi kondisi ideal, terdapat 5 indikator transparansi yang terpenuhi, sehingga presentase yang di peroleh yaitu 83%, yang artinya bahwa kondisi ini masuk dalam interval yang ke-4 yaitu transparan. Penelitian di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan elemen yang tidak dapat terpisahkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan dari segi Akuntabilitas ada beberapa proyek yang kurang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, seperti jarang di lakukannya laporan secara periodik pada LKM Duku, dan Ampera sesuai dengan Pedoman Teknis PNPM

Mandiri Perkotaan bahwa laporan kegiatan harus diberikan kepada pihak-pihak terkait (Kelurahan, Kecamatan dan lain-lain) dan setiap awal bulan jarang dilakukan pertemuan antar anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Sedangkan LKM Usaha Bersama laporan keuangan di laporkan secara periodik dan laporan kegiatan diberikan kepada pihak-pihak terkait (Kelurahan, Kecamatan dan lain-lain) dan setiap awal bulan dilakukan pertemuan antar anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan dari segi Transparansi LKM Usaha Bersama rutin melakukan pertemuan dan mengumumkan mengenai dana yang diterima LKM dan dana bergulir kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui papan informasi, buletin, yang memuat informasi nama KSM, jenis usaha dan total pinjaman, serta LKM Usaha Bersama melaporkan laporan keuangan dengan cara ditempel dan disampaikan kepada masyarakat, pihak terkait setiap awal bulan. Sedangkan LKM Duku dan LKM Ampera jarang mengumumkan mengenai dana yang diterima LKM dan dana bergulir kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang seharusnya diumumkan kepada masyarakat melalui papan informasi, buletin, yang memuat informasi nama KSM, jenis usaha dan total pinjaman, serta laporan keuangan harusnya ditempel dan disampaikan kepada masyarakat, pihak terkait setiap awal bulan.

Prinsip Transparasi dan Akuntabilitas yang merupakan salah satu prinsip PNPM Mandiri Perkotaan dan juga merupakan kebutuhan dari

sistem birokrasi di Indonesia saat ini. Instansi dituntut berbenah demi mewujudkan pelayanan, pemerataan pembangunan dan penataan struktur organisasi pemerintah yang baik termasuk LKM Usaha Bersama, Duku, dan Ampera yang berada di Kelurahan 2 Ilir Palembang. Azaz Transparansi dan Akuntabilitas menjadi sangat diperlukan saat ini agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan serta menengah terjadinya praktek-praktek yang merugikan Negara dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, masyarakat bisa mengawasi secara langsung semua tahapan pembangunan termasuk proses pelaksanaan PNPM Mandiri. Dalam hal akuntabilitas adalah masing-masing LKM telah membuat dan menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, tetapi tidak sesuai dengan aturan pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) Mandiri Perkotaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik meneliti pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang .

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Bagi Penulis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan utama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perkotaan.

### **b. Bagi LKM Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang**

Penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai masukan atau bahan evaluasi dan pertimbangan guna membuat kebijakan dalam pengambilan

keputusan terutama dalam meningkatkan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perkotaan.

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dan ilmu pengetahuan sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ani (2009), yang berjudul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) pada BKM Sembilan Rangkaian Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Rumusan Masalah bagaimanakah penerapan azas transparansi pada pengelolaan dana PNPM Perkotaan pada BKM Sembilan Rangkaian Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang ?

Variabel yang di teliti adalah Transparansi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Transparansi pengelolaan dana PNPM Mandiri Perkotaan pada BKM Sembilan Rangkaian Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik perolehan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner.

Hasil dari penelitian Ani menyatakan bahwa azas Transparansi perlu diterapkan karena, untuk mewujudkan masyarakat yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab dan dana yang di peroleh oleh setiap BKM/LKM

harus dilaporkan kepada masyarakat sesuai dengan pedoman PNPM Mandiri.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fitri (2009), yang berjudul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) pada BKM Sehati Kelurahan Sukarami Kota Palembang. Rumusan Masalah mengapa belum menerapkan akuntabilitas pengelolaan dana PNPM mandiri pada BKM Sehati Kelurahan Sukarami Kota Palembang ?

Variabel yang diteliti adalah Akuntabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Akuntabilitas pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM Sehati Kelurahan Sukarami Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder. Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif. Teknik perolehan data yang digunakan adalah dokumentasi dan kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini Analisis data Kuantitatif.

Hasil dari penelitian Fitri menyatakan bahwa pelaporan pengelolaan dana PNPM Mandiri yang akuntabel dan transparan merupakan kewajiban bagi BKM, karena dana yang diterima merupakan dana dari pemerintah sehingga dalam pengelolaannya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan demi suksesnya program PNPM Mandiri serta terciptanya akuntabilitas publik.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Vivi (2012), yang berjudul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM Betul Kota Malang (Studi kasus pada BKM Betul Kota Malang). Rumusan masalah yaitu bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM Betul Kota Malang ?

Variabel yang diteliti adalah Akuntabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Akuntabilitas pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM Betul Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik perolehan data yang digunakan adalah dokumentasi dan kuesioner.

Hasil dari penelitian Vivi menyatakan bahwa pengelolaan dana PNPM Mandiri pada UPK Betul mengacu pada AD/RT yang sudah ditetapkan warga kelurahan, yaitu sebagai berikut:

1) Sumber keuangan BKM Betul

Sumber keuangan atau modal BKM Betul diperoleh dari :

- a) Sumber pendanaan yang berasal dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari pemerintah yang digunakan untuk KSM usaha ekonomi produktif, pembangunan sarana prasarana dasar dan pengembangan sosial.
- b) Jasa yang dikutip dari dana bergulir yang dikelola oleh KSM yang sebagian penggunaan jasa tersebut untuk penambahan modal BKM.

c) Dana dari bantuan pihak lain yang sah dan tidak meningkat.

2) Penggunaan dana PNPM Mandiri

Di dalam AD/RT BKM Betul Kota Malang menetapkan penggunaan dana PNPM Mandiri, yaitu :

- a) Penambahan modal BKM Betul sebesar 35%.
- b) Pembagunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar lingkungan sebesar 25%.
- c) Biaya Operasional pengurus BKM Betul sebesar 30%.

3) Laporan keuangan BKM

- a) BKM dibantu oleh kesekretariatan dan UPK diwajibkan membuat pembukuan yang rapi dan tertib mengenai kegiatan BKM, membuat laporan triwulan dan tahunan yang disesuaikan dengan variabel penilaian kinerja BKM.
- b) Dalam pengelolaan keuangan BKM Betul menggunakan prinsip akuntabilitas.

**Tabel II.1**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Peneliti &amp; Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Ani Karni Yati (2009)	Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM Sembilan Rangkai Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang	Penelitian sebelumnya dan sekarang sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner	Penelitian sebelumnya menganalisis tentang penerapan azaz transparansi pengelolaan dana PNPM Mandiri, sedangkan peneliti menganalisis tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana PNPM mandiri
2	Fitri Rusmala Sari (2009)	Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM Sehati Kelurahan Sukarumi Kota Palembang	Penelitian sebelumnya dan sekarang sama-sama menggunakan jenis penelitian Deskriptif	Penelitian sebelumnya menggunakan analisis data kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan analisis data kualitatif
3	Vivi Dwi Aryani (2012)	Analisis akuntabilitas pengelolaan dana PNPM Mandiri pada BKM Betul Kota Malang	Penelitian sebelumnya dan sekarang sama-sama menggunakan data primer dan data sekunder	Penelitian sebelumnya menganalisis tentang akuntabilitasnya saja, sedangkan peneliti menganalisis tentang akuntabilitas dan transparansi

Sumber :Penulis, 2015

## B. Landasan Teori

### 1. Akuntabilitas

#### a. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas ini diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan, baik di tingkat program, daerah dan masyarakat. Oleh sebab itu semua unit pengambilan keputusan dalam semua tataran harus melaksanakan proses pengambilan keputusan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Budi Yuwono, P: 2010 : 39).

Mardiasmo(2009: 21) pengertian akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggungjawab.

Mardiasmo(2009: 21) akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi (Turner and Hulme, 2007).Terwujudnya akuntabilitas publik merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik.

Dari pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mardiasmo (2009 :20) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban kegiatan menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberi amanah (*principal*) memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

**b. Macam-Macam Akuntabilitas Publik**

Mardiasmo(2009:21-22) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

- 1) Akuntabilitas vertical (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR.
- 2) Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

**c. Dimensi Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (2009: 21)

menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas Hukum (*accountability for probity and legality*).

Akuntabilitas kejujuran dan (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalagunaan jabatan (*abuse of power*), dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

- 2) Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem manajemen, dan prosedur administrasi.

- 3) Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

- 4) Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

#### **d. Indikator Akuntabilitas**

Akuntabilitas dimaknai pertanggungjawaban suatu lembaga kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi atau tugas yang telah diembannya dalam booklet PNPM Mandiri Perkotaan yang diterbitkan Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya mengenai Akuntabilitas dan Transparansi, Indikator Akuntabilitas diantaranya adalah (Budi Yuwono 2010: 40):

- a) UP-UP BKM dikelola bersama secara aktif sesuai rencana atau program LKM, adanya pengurus dan rutin melakukan pertemuan.
- b) Pembukuan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan standar P2KP.
- c) Dana yang bergulir ke LKM tersalur ke KSM untuh tanpa potongan.
- d) Tidak ada penyalahgunaan dana/korupsi baik terhadap BOP BKM maupun penyaluran dana.
- e) Penarikan dana dari rekening Bank BKM ditandatangani 3 orang anggota BKM.
- f) Anggota KSM penerima dana BLM sama dengan yang diusulkan dalam proposal KSM, LPJ KSM lengkap dan benar termasuk didalamnya rincian swadaya masyarakat yang dapat direalisasikan.

- g) Kegiatan yang dilaksanakan KSM sesuai dengan usulan yang disetujui oleh BKM.
- h) Tingkat pengembalian pinjaman bergulir minimal 90%
- i) Tidak ada pemotongan dana KSM kepada masyarakat.
- j) Minimal 90% dana pinjaman merupakan *outstanding loan*.
- k) 100% penerima manfaat kegiatan ekonomi bergulir dan sosial adalah kk miskin yang terdaftar dalam format PS 2 (daftar kepala keluarga miskin hasil pemetaan swadaya).
- l) 70% penerima manfaat kegiatan lingkungan umum adalah kepala keluarga miskin yang terdaftar dalam PS2.

## 2. Transparansi

### a. Definisi Transparansi

Transparansi pada dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan ataupun membutuhkan untuk mengetahui informasi-informasi mengenai konsep PNPM Mandiri, baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat. Dalam hal ini, semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan keuangan dana bantuan PNPM

Mandiri harus dipublikasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas serta pihak-pihak lainnya secara terbuka melalui berbagai saluran media, seperti pertemuan, media elektronik, media cetakan dan sebagainya (Budi Yuwono, P: 2010).

Mardiasmo (2009: 17) pengertian Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, informasi dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Abdul Halim (2007: 22) Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka, dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah, dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

## **b. Indikator Transparansi**

Berdasarkan Buku Pedoman PNPM-MP Mandiri Perkotaan mengenai Akuntabilitas dan Transparansi, Indikator Transparansi LKM diantaranya (Budi Yuwono 2010: 41) :

- a) Dana yang diterima LKM dan pengalokasiannya diumumkan kepada masyarakat minimal di 5 papan informasi (pengumuman).
- b) Laporan keuangan ditempel di 5 papan yang strategis dan disampaikan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait setiap tanggal 5 di awal bulan.
- c) KSM yang termasuk daftar tunggu dan telah mendapat prioritas dari LKM diumumkan kepada masyarakat minimal 5 papan informasi (pengumuman).
- d) Rekening bank atas nama LKM ditandatangani oleh 3 orang anggota LKM diumumkan kepada masyarakat minimal 5 papan informasi (pengumuman).
- e) Setiap kegiatan pembangunan dan perbaikan lingkungan dilengkapi dengan papan informasi proyek dan minimal berisi tentang nama kegiatan, volume kegiatan, lokasi kegiatan, nilai BLM,

Swadaya sumber dana lain, tanggal pelaksanaan dan nama KSM pelaksana.

- f) Penetapan kebijakan keuangan didasarkan pada rembuk bersama.

**c. Implikasi Transparansi**

Ada empat bentuk implikasi transparansi yang diperlukan, antara lain (Hariyoso, S. 2007: 45):

- 1) Semua informasi yang berkaitan dengan kepentingan pihak harus terbuka bagi siapa saja. Ketidak terbukaannya informasi akan mendorong terjadinya penyelewengan.
- 2) Mekanisme kontrol tidak akan terjadi jika tidak ada keterbukaan dalam memperoleh akses informasi.
- 3) Masyarakat harus memiliki akses untuk memperoleh semua informasi/keuangan yang berkaitan dengan publik.
- 4) Semua informasi tersebut harus dapat/mudah dimengerti oleh masyarakat.

**3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP)**

**Mandiri Perkotaan**

**a. Definisi PNPM-MP Mandiri Perkotaan**

Menurut *The World Bank* (2013) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional dalam bentuk kerangka kebijakan sebagai dasar dan

acuan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis program penanggulangan kemiskinan. Program ini diluncurkan oleh Pemerintah di Palu pada tahun 2007 dan akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, sejalan dengan target waktu pencapaian MDGs (*Millenium Development Goals*) kemandirian masyarakat diharapkan telah tercapai sehingga kesinambungan program dapat diwujudkan. Pelaksanaan PNPM-MP Mandiri Perkotaan dimulai dengan Kecamatan Development Program (KDP).

PNPM-MP Mandiri Perkotaan adalah kebijakan dan program pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan (Tim Koordinasi PNPM-MP Mandiri Perkotaan, 2014:1)

**b. Sasaran PNPM-MP Mandiri Perkotaan**

Sasaran PNPM-MP Mandiri Perkotaan adalah :

- 1) Terbagunnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang dipercaya, aspiratif, representative, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat.
- 2) Tersedianya Perencanaan Jangka Menengah (PJM) *Pronangkis*.
- 3) Terbangunnya forum LKM tingkat kecamatan dan Kota/Kabupaten.

- 4) Terwujudnya kontribusi pendanaan dari pemerintah Kota/Kabupaten dalam PNPM Mandiri sesuai dengan kapasitas fisik daerah (Tim Koordinasi PNPM Mandiri, 2014:2).

**c. Tujuan PNPM-MP Mandiri Perkotaan**

Menurut *The World Bank* tujuan PNPM Mandiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, dengan meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan upaya meningkatkan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan mereka menggunakan potensi sosial dan ekonomi mereka secara efisien.

Tujuan PNPM-MP Mandiri Perkotaan adalah :

- 1) Mewujudkan masyarakat berdaya dan mandiri yang mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan diwilayahnya sejalan dengan kebijakan PNPM-MP MandiriPerkotaan .
- 2) Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dengan masyarakat dan kelompok peduli setempat.

- 3) Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi penanggulangan kemiskinan.
- 4) Meningkatkan pencapaian manfaat bagi masyarakat Miskin untuk mendorong peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Tim Koordinasi PNPM-MP Mandiri Perkotaan (2014:2).

#### **d. Prinsip PNPM-MP Mandiri Perkotaan**

Prinsip PNPM-MP Mandiri Perkotaan terdiri dari prinsip-prinsip PKK ditambah dengan beberapa prinsip lain yang merupakan penekanan terhadap prinsip-prinsip yang telah ada dan dilakukan sebelumnya dalam PKK atau PNPM-PKK, yakni:

- 1) Bertumpu pada Pembangunan Manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- 2) Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan secara swakelola.
- 3) Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.
- 4) Berorientasi pada Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan, harus mengutamakan kepentingan

- dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- 5) Partisipasi/Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.
  - 6) Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
  - 7) Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
  - 8) Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
  - 9) Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan

bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal sebagai sumberdaya yang terbatas.

10) Kolaborasi. Semua pihak yang bekepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

11) Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. (Tim Koordinasi PNPM-MP Mandiri Perkotaan, 2014:2).

#### **4. Pendanaan**

##### **a. Definisi Pendanaan**

Dalam mencapai tujuan organisasi, baik organisasi yang mencari profit maupun nonprofit sangat memerlukan modal dalam menjalankan aktivitasnya. Modal tersebut berupa dana yang berasal dari sumbangan dana (kontribusi dana) dari masyarakat yang antara lain dapat berbentuk pajak atau pungutan-pungutan yang resmi.

Pengertian dana dalam arti sempit dapat diartikan sebagai dana kas atau dana sumber lainnya. Dana (*fund*) menurut Arifin Sabeni dan Imam Ghazali (2007: 10) adalah kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri dengan satu perangkat rekening yang saling berimbang (*self balancing*) untuk membukukan kas dan sumber lainnya bersama-sama dengan utang, kebijakan-kebijakan, cadangan-cadangan, dan hak milik yang disisihkan dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan, limitasi yang ada. Dana merupakan suatu sumber utama dalam menjalankan suatu aktivitas sehingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dana yang diberikan dalam PNPM-MP Mandiri Perkotaan adalah sumber dari APBD dan dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang bersifat stimulat dan sengaja disediakan untuk masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih dengan mencoba melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan. Dana ini diperuntukkan kepada masyarakat dikecamatan, terutama oleh penduduk miskin, Tim Koordinasi PNPM-MP Mandiri Perkotaan (2014:13).

**b. Penggunaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) Mandiri Perkotaan**

Penggunaan dana PNPM-MP terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa:

- 1) Penyediaan dan perbaikan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM. Dengan demikian sarana lalu lintas tidak terganggu.
- 2) Penyediaan sumber daya keuangan melalui danabergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Dengan begitu masyarakat terpenuhi kebutuhan hidupnya.
- 3) Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs. Melakukan perbaikan pada individu masyarakat.
- 4) Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Untuk menambah kegiatan perempuan, dengan demikian perempuan tidak hanya terfokus kepada urusan rumah tangga saja.
- 5) Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi keuangan serta penerapan tata

keperintahan yang baik. Dengan cara melakukan pelatihan untuk masyarakat. Tim Koordinasi PNPM-MP (2014:14).

**c. Organisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) Mandiri Perkotaan**

Organisasi PNPM-MP penyelenggaraan program PNPM-MP secara tingkat berjenjang dari tingkat kota sampai ketinggian desa/kelurahan dengan pengorganisasian sebagai berikut:

1) Tingkat Nasional

Penanggung jawab pengelolaan program tingkat nasional PNPM-MP adalah Departemen Pekerjaan Umum yang bertindak sebagai penyelenggara program yang dalam pelaksanaan Menteri Pekerjaan Umum membentuk organisasi dan tata kerja unit manajemen program P2KP (PMU-P2KP) melalui keputusan menteri pekerjaan umum nomor: 358/KPTS/M/2008 tentang organisasi dan tata kerja unit manajemen program penanggulangan kemiskinan.(PMU-P2KP).

2) Tingkat Provinsi

Tingkat provinsi dikoordinasi langsung oleh gubernur setempat melalui Bapeda Provinsi dengan menunjuk tim koordinasi pelaksanaan PNPM-MP yang anggotanya terdiri

dari pejabat terkait di daerah dibawah koordinasi Tim koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah Provinsi.

3) Tingkat Kota

Tingkat kota/kabupaten dikoordinasi langsung oleh walikota/bupati setempat melalui Bapeda Kota menunjuk Tim koordinasi pelaksana PNPM-MP.

4) Tingkat Kecamatan

a. Camat berperan memberikan dukungan kelancaran pelaksana kerjanya.

b. Penanggungjawab operasional kegiatan perangkat kecamatan yang diangkat oleh kepala satuan kerja atas usulan Walikota/Bupati untuk pengendalian kegiatan ditingkat kelurahan dan berperan sebagai penanggung administrasi pelaksana PNPM-MP di wilayah kerjanya.

5) Tingkat Kelurahan/Desa

a. Lurah atau kepala desa berperan memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan PNPM-MP di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui PNPM Mandiri dapat tercapai dengan baik.

b. Relawan Masyarakat berperan sebagai konsekuensi logis dari penerapan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dan penerapan konsep membangun dari

dalam yang membutuhkan pelapor-pelapor penggerak dari masyarakat sendiri. Megabdi tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen yang kuat kemajuan masyarakat di wilayahnya.

- c. LKM atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan pada umumnya.
- d. KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat pemanfaat dana BLM PNPM-MP yang diorganisasikan oleh Tim Relawan dan dibantu oleh Tim Fasilitator terdiri dari warga kelurahan yang memiliki ikatan kebersamaan dan berujung untuk mencapai tujuan bersama.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2012: 11-12) jenis penelitian dilihat dari tingkat ekplanasi:

1) **Penelitian Deskriptif**

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan dua variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih.

2) **Penelitian Komparatif**

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.

3) **Penelitian Asosiatif**

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk menjelaskan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana PNPM Mandiri Perkotaan pada LKM Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang beralamat di Yos Sudarso No. 1 Kecamatan Ilir Timur 2 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

## C. Operasionalisasi Variabel

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Akuntabilitas Pengelolaan Dana PNPM-MP	Suatu upaya untuk memberikan <i>pertanggungjawaban</i> mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Pengelola Lembaga Keswadayaan masyarakat (LKM) dikelola bersama secara aktif sesuai rencana atau program Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), adanya pengurusnya dan rutin melakukan pertemuan</li> <li>2. Pembukuan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan standar Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan</li> <li>3. Dana yang tersalur ke Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) tersalur ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tanpa potongan</li> <li>4. Tidak ada penyalahgunaan dan/korupsi baik terhadap Biaya Operasional (BOP) Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) maupun penyaluran dana</li> <li>5. Penarikan dana dari rekening Bank Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di tandatangani 3 orang anggota</li> </ol>

			Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)
2	Transparansi Pengelolaan Dana PNPM-MP	Keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana yang diterima Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan pengalokasiannya diumumkan kepada masyarakat minimal di 5 papan informasi</li> <li>2. Laporan keuangan ditempel di 5 papan yang strategis dan disampaikan kepada masyarakat</li> <li>3. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang termasuk daftar tunggu dan telah mendapat prioritas dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) diumumkan kepada masyarakat minimal 5 papan informasi</li> <li>4. Rekening bank atas nama Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) ditandatangani oleh 3 orang anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)</li> <li>5. Setiap kegiatan pembangunan dan perbaikan lingkungan dilengkapi dengan papan informasi proyek</li> </ol>

Sumber :Penulis, 2015

#### **D. Data yang Diperlukan**

Menurut Nur dan Bambang (2009: 146-147) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:

##### **1) Data Primer**

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.

##### **2) Data Sekunder**

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada ketua, Staf LKM dan Masyarakat. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi, artikel, jurnal, dan laporan LKM.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2012: 157-168) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

##### **1) Interview (wawancara)**

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

## 2) Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

## 3) Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

## 4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi. Wawancara dengan komunikasi langsung dengan Ketua, Staf LKM. Dokumentasi dengan cara mengumpulkan tulisan, atau karya-karya jurnal dan artikel.

## **F. Analisis Data dan Teknik Analisis**

### **1) Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2012: 13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

#### **a) Analisis Kualitatif**

Analisis kualitatif merupakan suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

#### **b) Analisis Kuantitatif**

Analisis Kuantitatif merupakan suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan menjelaskan objek yang akan teliti melalui akuntabilitas dan transparansi dengan kenyataan yang terjadi pada pengelolaan dana PNPM Mandiri LKM Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang.

### **2) Teknik Analisis**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis terhadap akuntabilitas dan transparansi untuk mengetahui pengelolaan dana PNPM-MP Mandiri Perkotaan pada LKM Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Terdiri

dari dua variabel yaitu Akuntabilitas dan Transparansi. Akuntabilitas dengan cara, yaitu:

1. Unit Pengelola Lembaga Keswadayaan masyarakat (LKM) dikelola bersama secara aktif sesuai rencana atau program Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), adanya pengurusnya dan rutin melakukan pertemuan.
2. Pembukuan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan standar Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.
3. Dana yang tersalur ke Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) tersalur ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tanpa potongan.
4. Tidak ada penyalahgunaan dan/korupsi baik terhadap Biaya Operasional (BOP) Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) maupun penyaluran dana.
5. Penarikan dana dari rekening Bank Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di tandatangani 3 orang anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Transparansi dengan cara, yaitu :

1. Dana yang diterima Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan pengalokasiannya diumumkan kepada masyarakat minimal di 5 papan informasi.

2. Laporan keuangan ditempel di 5 papan yang strategis dan disampaikan kepada masyarakat.
3. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang termasuk daftar tunggu dan telah mendapat prioritas dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) diumumkan kepada masyarakat minimal 5 papan informasi.
4. Rekening bank atas nama Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) ditandatangani oleh 3 orang anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).
5. Setiap kegiatan pembangunan dan perbaikan lingkungan dilengkapi dengan papan informasi proyek.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) Mandiri Perkotaan**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) Mandiri Perkotaan merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan pemerintah sejak 2007, di mana sebelumnya yakni pada tahun 1999 program ini dikenal dengan nama P2KP (program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). P2KP saat itu dilaksanakan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat akibat krisis ekonomi tetapi juga bersifat strategis, (karena disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat di masa mendatang). Bagi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, program ini dinilai sangat strategis. Melalui PNPM Mandiri Perkotaan, Ditjen Cipta Karya mengarahkan Pemerintah Daerah agar makin responsif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah masing-masing. Selain itu dilakukan pula pendampingan secara intensif terhadap masyarakat, agar mereka mampu berupaya menanggulangi kemiskinan di wilayahnya, sehingga diharapkan ke depan Pemerintah Daerah menjadi mandiri, dan pada akhirnya mampu menciptakan masyarakat madani.

Hingga saat ini, PNPM Mandiri Perkotaan terus mendampingi Pemda dan masyarakat dengan memberikan *technical assistance* atau bantuan teknis. Langkah ini dilakukan agar dukungan serta peran serta Pemda terhadap PNPM Mandiri Perkotaan terus menguat dari waktu ke waktu. Berikut ini sejumlah kisah sukses atau best practice dari Pemda maupun masyarakat yang layak dijadikan contoh dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan.

PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebuah program pemerintah nasional yang bertujuan untuk membuat program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui pengembangan sistem, mekanisme dan prosedur program, pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2007 dimulai dengan dua program pemberdayaan masyarakat, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pemberdayaan masyarakat di perdesaan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan.

Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik; dan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk

mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM juga diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen sektor. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir.

## **2. Gambaran Umum Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang**

Salah satu program pemerintah dalam memenuhi hajat hidup orang banyak dan upaya menggeser paradigma pembangunan yang bertumpu pada peran pemerintah semata (*people center*) kearah paradigma pembangunan masyarakat (*people center*). Dalam kerangka tersebut program bantuan masyarakat yang diberi nama PNPM Mandiri, diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Bapak Susilo Bambang Yudhoyono 30 April 2007 di Kota Palu Sulawesi Tengah. Program ini sekaligus menandai keseriusan pemerintah untuk mengubah logika pendekatan proyek menjadi program, hal ini dilakukan dengan konsolidasi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementerian atau lembaga.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) Mandiri Perkotaan mulai Tahun 2007 ini yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

yaitu, melalui PNPM-MP Mandiri Perkotaan. Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan untuk masyarakat miskin dan wilayah yang tertinggal. Salah satu lembaga yang menaggulangnya adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang berada langsung di setiap kelurahan. Termasuk didalamnya adalah beberapa LKM yang ada di Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang.

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang didirikan pada Tahun 2007 dan dibentuk melalui Revisi Pembentukan LKM setiap awal bulan di setiap tahunnya yang dihadiri 8 (Delapan) orang yang dibina oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya melalui program yang diberi nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) Mandiri Perkotaan. LKM Kecamatan Ilir 2 Palembang adalah lembaga pimpinan secara kolektif kolegial, bersifat otonom, independen yang di prakasai dan di bentuk langsung oleh masyarakat atau penduduk yang berada di Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang yang terdiri dari pribadi-pribadi yang dipilih dan dipercaya warga berdasarkan kriteria luhur kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili masyarakat kecamatan dalam berbagai kepentingan untuk mengatasi berbagai masalah di masyarakat khususnya masalah kemiskinan, menumbuhkan kembali iman dan solidaritas sosial antar warga agar saling bekerja sama demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Visi, Misi Prinsip Maksud dan Tujuan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang**

#### **a) Pernyataan Visi LKM Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang**

Terbentuknya masyarakat Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang yang mandiri, berkepedulian, serta bersinergi dalam upaya penggulungan kemiskinan secara Mandiri. Efektif dan berkelanjutan dan juga menjadi warga yang produktif secara sosial, ekonomi dan hidup dalam keadaan kondisi lingkungan yang tertata.

#### **b) Pernyataan Misi LKM Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang**

- 1) Mendorong masyarakat miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri.
- 2) Menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur dalam masyarakat untuk mewujudkan tantangan masyarakat yang baik.
- 3) Menumbuhkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya masyarakat dan pemerintah dalam upaya penggulungan kemiskinan.
- 4) Mendorong organisasi masyarakat warga yang mengakar dan dipercaya serta mandiri.

**c) Pernyataan Prinsip LKM Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang**

LKM kecamatan Ilir Timur 2 Palembang bekerja dengan dilandaskan prinsip : Demokrasi, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi dan Desentralisasi.

**d) Pernyataan Maksud dan Tujuan**

- 1) Membangun komitmen bersama dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- 2) Merencanakan Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis) berbasis kebutuhan riil masyarakat dengan menggali dan menumbuh kembangkan potensi yang ada dimasyarakat dengan mempertimbangkan tingkat kemanfaatan bagi masyarakat miskin.
- 3) Mendorong keswadayaan sebagai kontribusi/kepedulian masyarakat dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan yang dihadapi secara mandiri.
- 4) Mengembangkan mekanisme kontrol sosial dalam implementasi/realisasi perencanaan.
- 5) Menciptakan iklim pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabilitas.

- 6) Evaluasi bersama terhadap realisasi program untuk perbaikan dan pengembangan langkah-langkah strategi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- 7) Melakukan pembelajaran bersama dalam perencanaan pembangunan secara terpadu.

#### **4. Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Jabatan**

Pada umumnya dalam setiap organisasi terutama dalam LKM harus mempunyai struktur organisasi yang merupakan suatu pedoman untuk melaksanakan tugas bagi masing-masing bagian, struktur organisasi adalah susunan organisasi yang memisahkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari setiap bagian di dalam lembaga tersebut. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) akan berjalan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan bila mempunyai organisasi yang jelas.

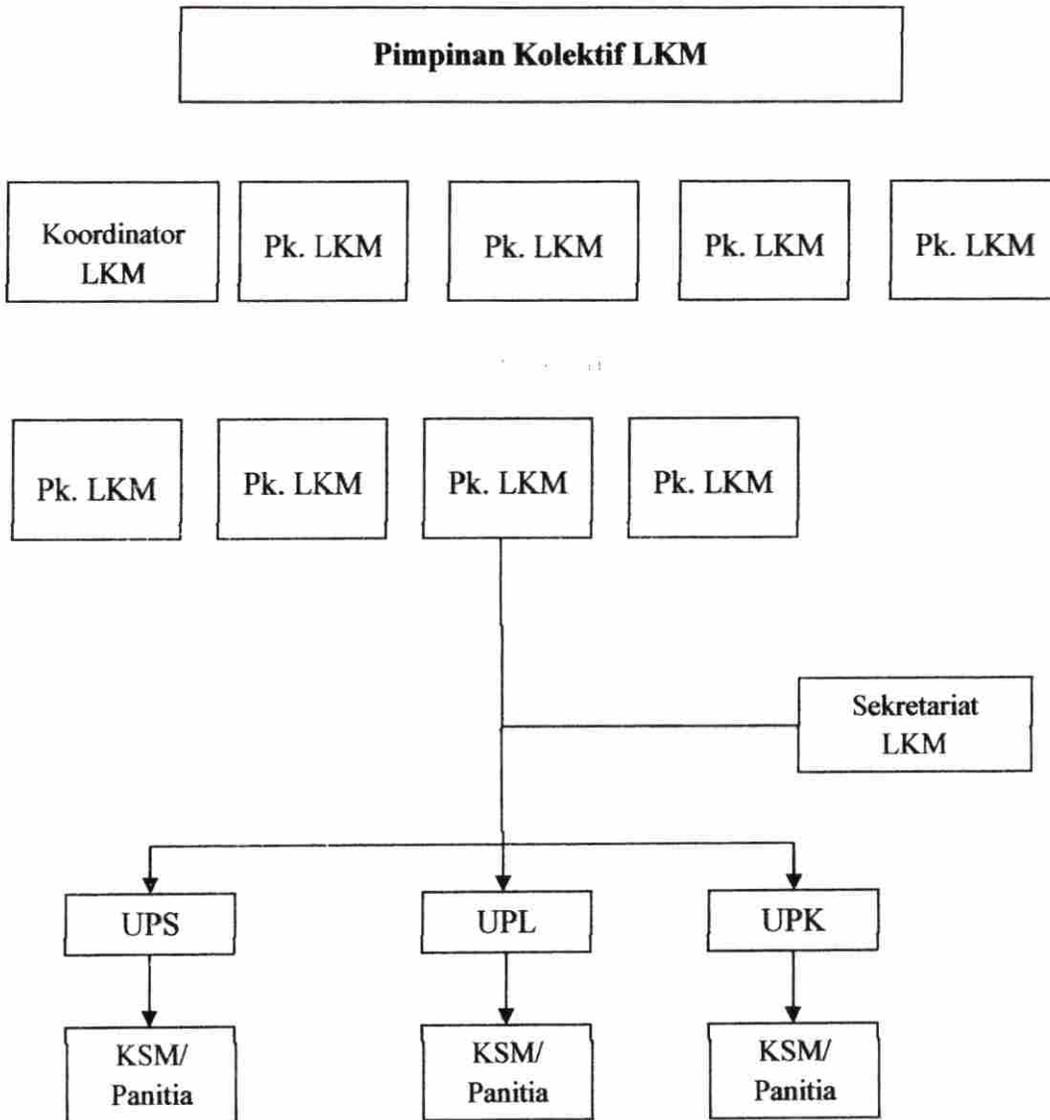
Demi mencapai tujuan lembaga supaya dapat berjalan dengan lancar dan tekoordinasi, maka karyawan harus terlebih dahulu mengetahui tugas, tanggung jawab, dan wewenang seorang karyawan serta kepada siapa karyawan tersebut bertanggung jawab dapat dilihat dari struktur organisasi secara formal akan terlihat jelas tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing karyawan serta kedudukan dalam lembaga.

Struktur organisasi suatu LKM tidak akan sama dengan struktur organisasi yang terdapat pada LKM lainnya, hal ini disebabkan oleh perbedaan pada kegiatan. Setiap LKM mempunyai bentuk organisasi yang

berbeda, keberadaan struktur organisasi dalam suatu LKM sangatlah penting artinya dalam usaha pencapaian tujuan lembaga, karena adanya pembagian tugas. Tanggung jawab dan wewenang yang jelas memungkinkan kegiatan-kegiatan lembaga dapat dilaksanakan dan diarahkan secara efisien dan efektif.

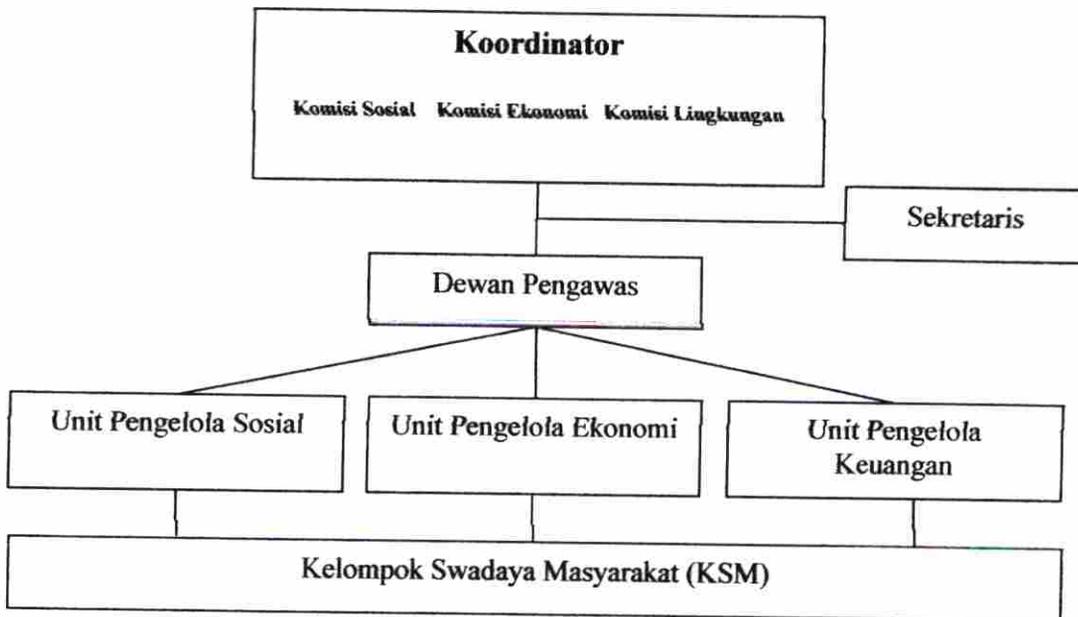
Berikut ini dapat dilihat susunan struktur organisasi dan tanggung jawab jabatan pada LKM Ampera, Duku, dan Ampera sebagai berikut:

**Gambar IV.1**  
**Stuktur Organisasi**  
**Lembaga Keswadayaan Masyarakat**  
**Usaha Bersama Kelurahan 2 Ilir**



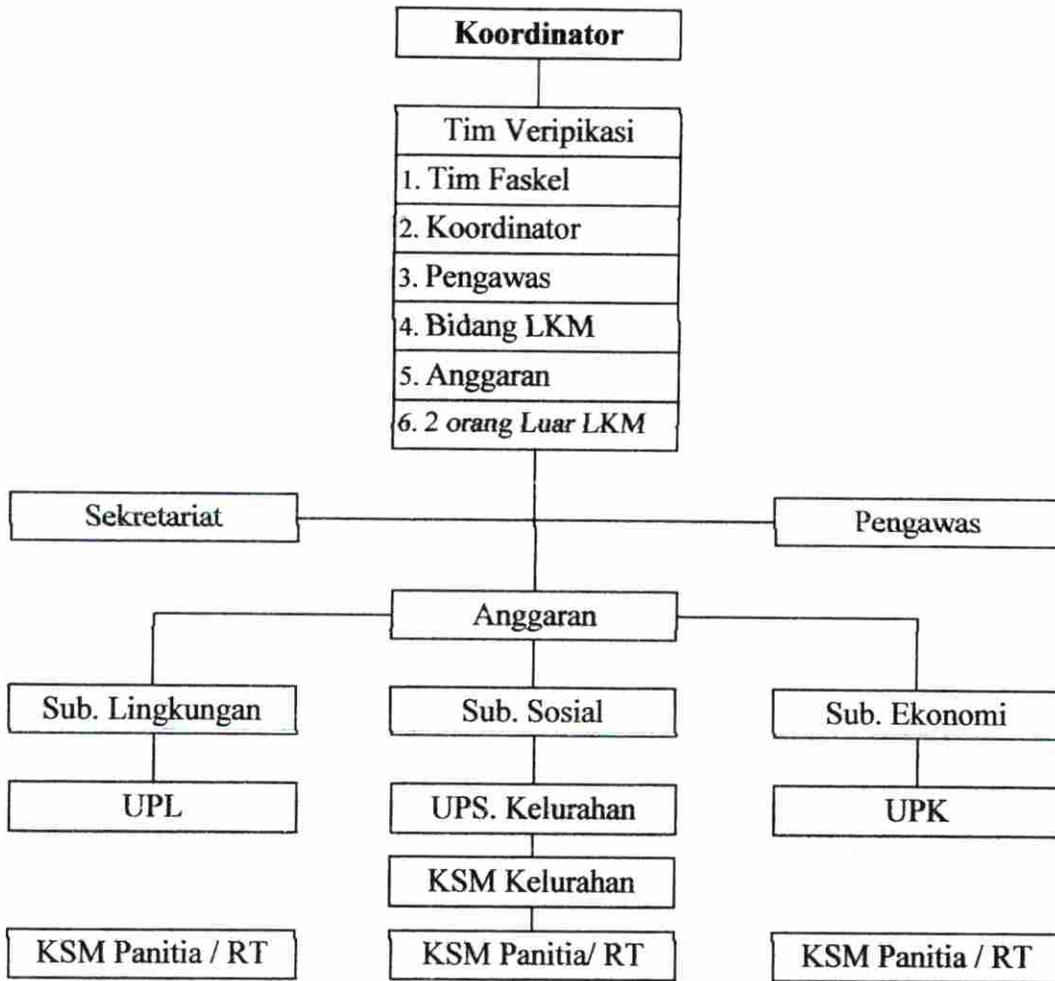
Sumber: LKM Usaha Bersama, 2015

**Gambar IV.2**  
**Struktur Organisasi**  
**Lembaga Keswadayaan Masyarakat Duku**  
**Kelurahan Duku**



Sumber: LKM Duku, 2015

**Gambar IV.3**  
**Struktur Organisasi**  
**Lembaga Keswadayaan Masyarakat Ampera**  
**Kelurahan 3 Ilir**



Sumber: LKM Ampera, 2015

Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab yang ada di LKM Kecamatan Ilir Timur 2 adalah sebagai berikut :

a) Lurah

Tugas dan tanggung jawab Lurah dalam pelaksanaan PNPM-MP Mandiri Perkotaan adalah :

- 1) Membantu sosialisasi awal PNPM-MP Mandiri Perkotaan kelurahan masyarakat diwilayahnya.
- 2) Memfasilitasi proses pemahaman masyarakat mengenai PNPM-MP Mandiri Perkotaan dan atas nama warga mengajukan surat ke KWM dan Bappedda Kota, yang menyatakan kesiapan warga masyarakat melaksanakan PNPM-MP.
- 3) Memfasilitasi pendaftaran relawan-relawan masyarakat secara demokratis, transparan dan akuntabel.
- 4) Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan-pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan KWM/Tim Fasilitator, dan relawan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan PNPM-MP.
- 5) Memfasilitasi proses pengorganisasian masyarakat dan pembentukan lembaga kepemimpinan masyarakat dikelurahan.
- 6) Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan termasuk

peninjauan lapangan oleh berbagai pihak berkepentingan.

- 7) Memfasilitasi pelaksanaan pemetaan swadaya (*Community Self Survey*) dalam rangka pemetaan kemiskinan dan potensi sumberdaya masyarakat yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat.
- 8) Memfasilitasi dan mendukung penyusunan Program Jangka Menengah Penanggulangan kemiskinan dan rencana tahunannya oleh masyarakat yang diorganisasikan oleh lembaga kepemimpinan masyarakat setempat (LKM).
- 9) Mendorong tumbuh dan kembangnya proses pembangunan partisipatif di kelurahan.
- 10) Memfasilitasi LKM dan masyarakat agar mampu mencapai kinerja mandiri.
- 11) Memfasilitasi LKM Pronangkis sebagai salah satu masukan untuk masrembang kelurahan.
- 12) Bersama dengan LKM dan masyarakat dan kelompok peduli menyusun Master Plan Kelurahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin tata cara pelayanan publik yang baik (*good governance*) dan berorientasi pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*).

- 13) Mendukung dan turut aktif dalam proses penggalian, pembangunan, dan kelembagaan nilai-nilai universal kemanusiaan sebagai landasan pembangunan kapital sosial diwilayahnya.
  - 14) Memberi laporan bulanan kegiatan PNPM-MP diwilayahnya kepada camat.
  - 15) Berkoordinasi dengan Tim Fasilitator, relawan masyarakat dan LKM, memfasilitasi penyelesaian persoalan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan PNPM-MP.
- b) Koordinator
- Tugas dan tanggung jawab Lurah dalam pelaksanaan PNPM-MP adalah :
- 1) Melembagakan nilai-nilai universal kemanusiaan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan kehidupan bermasyarakat.
  - 2) Membangun mekanisme monitoring dan kontrol sosial dalam proses penanggulangan kemiskinan.
  - 3) Memfasilitasi masyarakat dalam rangka proses pembelajaran kritis tentang upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
  - 4) Bersama warga partisipatif merumuskan PJM Pronangkis di masing-masing kelurahan.

- 5) Mampu bertindak sebagai forum pengambil keputusan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
- 6) Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan.
- 7) Mengawasi proses pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang sehari-hari dikelola oleh UPK.
- 8) Memberikan keputusan akhir selesai usulan yang telah dilakukan oleh UPK dan Unit pengelola lainnya yang berawal dari usulan KSM atau panitia atau dari kelompok masyarakat lainnya.
- 9) Membangun transparansi melalui berbagai media, diantaranya papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan, laporan tengah bulanan atau laporan akhir tahunan, serta melakukan rapat terbuka dan melakukan audit keuangan.
- 10) Merumuskan, menyusun dan menetapkan peraturan main (termasuk sanksi) dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya manusia yang dimulai dan PNPB-MP.
- 11) Memfasilitasi jejaring kerjasama dengan potensi sumber daya yang ada dalam proses penanggulangan kemiskinan.

c) Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah salah satu gugus tugas dalam LKM sebagai unit pelaksana kebijakan-kebijakan yang ditetapkan LKM berkenaan dengan pengelolaan dana, pinjaman bergulir, administrasi keuangan, baik yang berasal dari dana stimulasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP maupun dari pihak-pihak lain.

d) Unit Pengelola Sosial (UPS)

Unit Pengelola Sosial (UPS) adalah salah satu gugus tugas LKM sebagai unit pelaksana kebijakan-kebijakan yang ditetapkan LKM berkenaan dengan kegiatan-kegiatan dibidang sosial.

e) Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

Unit Pengelola Lingkungan (UPL) adalah salah satu gugus tugas LKM sebagai unit pelaksana kebijakan-kebijakan yang ditetapkan LKM berkenaan dengan pengelolaan kegiatan di bidang pemeliharaan lingkungan, pembangunan perumahan dan permukiman diwilayahnya.

f) Sekretariat LKM

- 1) Sekretariat LKM bertindak sebagai notulen dalam setiap acara rapat/pertemuan LKM, memberikan laporan hasil

notulensi kepada seluruh Anggota Pimpinan Kolektif LKM ataupun pihak lain bekepentingan.

- 2) Sekretariat LKM bertugas menyusun agenda rapat/pertemuan LKM, membuat dan menyebarkan surat undangan.
  - 3) Mencatat administrasi keuangan operasional LKM dan mencatat pengelolaan BLM.
  - 4) Melaporkan administrasi keuangan kepada LKM secara berkala.
- g) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Bertugas mengembangkan melembagakan tanggung renteng, membangun jaminan karakter antar anggota, menggerakkan keswadayaan modal, meningkatkan dan menerbitkan pinjaman serta menguatkan dan mengembangkan usaha anggota. KSM ini minimal beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang dibentuk berdasarkan kesukarelaan, memiliki ikatan sosial, tujuan ekonomi, tujuan sosial, tujuan pemberlajaran dan domisili yang sama.

## **5. Aktivitas di LKM Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang**

Aktivitas Lembaga Keswadayaan menyalurkan dana PNPM-MP sesuai ketentuan PNPM-MP dan menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk

pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan pada umumnya.

#### **6. Produk di LKM Usaha Bersama Kelurahan 2 Ilir**

- 1) Jasa pinjaman usaha produktif ditetapkan sebesar 1,5% perbulan.
- 2) Jasa inflasi sebesar 7%.
- 3) Jasa resiko kredit 5%.
- 4) Jasa biaya operasional UPK sebesar 2%.
- 5) Jasa alokasi untuk LKM sebesar 4%.
- 6) Jasa pemupukan modal LKM Usaha Bersama Kelurahan 2 Ilir 15%.
- 7) Jasa pinjaman pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar lingkungan sebesar 20%.
- 8) Jasa kegiatan sosial masyarakat sebesar 20%.
- 9) Jasa peminjaman biaya operasional LKM 60%.

#### **7. Produk di LKM Duku Kelurahan Duku**

- 1) Jasa pinjaman usaha produktif ditetapkan sebesar 1,5% perbulan.
- 2) Jasa inflasi sebesar 8%.
- 3) Jasa resiko kredit 5%.
- 4) Jasa biaya operasional UPK sebesar 3%.
- 5) Jasa alokasi untuk LKM sebesar 6%.

- 6) Jasa pemupukan modal LKM Duku Kelurahan Duku 15%.
- 7) Jasa pinjaman pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar lingkungan sebesar 20%.
- 8) Jasa kegiatan sosial masyarakat sebesar 15%.
- 9) Jasa peminjaman biaya operasional LKM 50%.

#### **8. Produk di LKM Ampera Kelurahan 3 Ilir**

- 1) Jasa pinjaman usaha produktif ditetapkan sebesar 1,5% perbulan.
- 2) Jasa inflasi sebesar 6%.
- 3) Jasa resiko kredit 5%.
- 4) Jasa biaya operasional UPK sebesar 4%.
- 5) Jasa alokasi untuk LKM sebesar 5%.
- 6) Jasa pemupukan modal LKM Ampera Kelurahan 3 Ilir 10%.
- 7) Jasa pinjaman pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar lingkungan sebesar 15%.
- 8) Jasa kegiatan sosial masyarakat sebesar 10%.
- 9) Jasa peminjaman biaya operasional LKM 40%.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis 2 Variabel yang terdiri dari Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana PNPM-MP Mandiri Perkotaan dan Trasparansi Pengelolaan Dana PNPM-MP Mandiri Perkotaan yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) Mandiri Perkotaan Pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang.**

- a. Analisis Unit Pengelola Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dikelola bersama secara aktif sesuai rencana atau program Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), adanya pengurus dan rutin melakukan pertemuan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan sekretraris LKM yang bernama Endah menyatakan bahwa, pada LKM Usaha Bersama unit pengelola LKM mengelola LKM secara aktif, menjalankan program sesuai dengan rencana. LKM Usaha Bersama memiliki program Tridaya meliputi bidang Ekonomi, Lingkungan dan Sosial, dalam program Ekonomi LKM Usaha Bersama menjalankan peminjaman ekonomi bergulir kepada Kelompok Swadaya Masyarakat dengan besaran pinjaman 1,5% dan perhitungan jasa dengan sistem tanggung renteng. Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang melaksanakannya 15

KSM. Untuk program Lingkungan LKM inmelakukan kegiatan pembangunan jalan Rabat Beton, pembangunan sarana MCK, pembangunan Jembatan, Gorong-gorong (Parit Jalan), pembangunan drainase dengan jumlah 5 KSM. Yang tersebar di 43 Rukun Warga (RT). Dana yang di dapat untuk bidang ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), melalui Dirjen Cipta Karya Kementrian PU, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APDB) Kota Palembang. Untuk bidang Sosial LKM ini belum memiliki program untuk dilakukan. LKM Usaha Bersama biasanya dalam sebulan pengurus melakukan 3 kali pertemuan yaitu, setiap tanggal 5, tanggal 12, tanggal 20. Didalam pertemuan ini dihadiri pengurus LKM dan 20 anggota KSM. Dalam pertemuan LKM membahas tentang laporan keuangan, kegiatan yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan unit pengelola ekonomi LKM yang bernama Emiyati menyatakan bahwa, pada LKM Duku unit pengelola LKM kurang mengelola LKM secara aktif, jarang menjalankan program sesuai dengan rencana. LKM Duku juga memiliki program Tridaya meliputi bidang Ekonomi, Lingkungan dan Sosial, dalam program Ekonomi LKM Duku menjalankan peminjaman ekonomi bergulir kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan besaran pinjaman

1,5% dan perhitungan jasa dengan sistem tanggung renteng. Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang melaksanakannya berjumlah 30 KSM. Untuk program Lingkungan LKM ini melakukan kegiatan pembangunan jalan Rabat Beton, pembangunan Jembatan, pembangunan drainase dengan jumlah 3 KSM yang tersebar di 38 Rukun Tetangga (RT). Dana yang di dapat untuk program ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Swadaya Masyarakat. Untuk bidang Sosial LKM Duku melakukan program yaitu pembagian gratis baju seragam SD, SMP, SMA, Lansia, Posing, dan Akte Kelahiran. Jumlah KSM yang melaksanakannya 1 KSM dalam setiap kegiatan. LKM Duku jarang melakukan pertemuan setiap bulannya, jadi untuk membahas kegiatan mereka bertemu pada saat kegiatan akan dilakukan. Pertemuan ini dihadiri pengurus LKM dan 33 anggota KSM. Dalam pertemuan LKM membahas tentang laporan keuangan, kegiatan yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ketua LKM yang bernama Idrus menyatakan bahwa, pada LKM Ampera unit pengelola LKM kurang mengelola LKM secara aktif, jarang menjalankan program sesuai dengan rencana. LKM Duku juga memiliki program Tridaya meliputi bidang Ekonomi, Lingkungan dan Sosial, dalam program Ekonomi LKM Ampera menjalankan

peminjaman ekonomi bergulir kepada Kelompok Swadaya Masyarakat dengan besaran pinjaman 1,5% dan perhitungan jasa dengan sistem tanggung renteng. Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang melaksanakannya berjumlah 49 KSM. Untuk program Lingkungan LKM inmelakukan kegiatan jalan setapak, pembangunan jalan Rabat Beton, pembangunan sarana MCK, pembangunan Jembatan, Gorong-gorong (Parit Jalan), pembangunan drainase dengan jumlah 48 KSM yang tersebar di 51 Rukun Tetangga (RT). Tetapi pada LKM Ampera ini terdapat 3 wilayah yang tidak boleh di bantu dengan dana PNPM seperti Komplek Polisi, Asrama Zidam (TNI), dan Komplek PLN. Dana yang di dapat untuk program ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk bidang Sosial LKM Duku melakukan program yaitu pembagian gratis baju seragam SD, SMP, Lansia. Jumlah KSM yang melaksanakannya tergantung kegiatan. LKM Ampera jarang melakukan pertemuan setiap bulannya, jadi untuk membahas kegiatan mereka bertemu pada saat kegiatan akan dilakukan. Pertemuan ini dihadiri pengurus LKM dan 97 anggota KSM. Dalam pertemuan LKM membahas tentang laporan keuangan, kegiatan yang akan dilakukan.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa LKM Usaha Bersama yang mengelola LKM secara aktif dan melakukan pertemuan rutin setiap

bulannya. LKM Usaha Bersama, Duku, dan Ampera memiliki Program yang sama yaitu, program TRIDAYA meliputi Bidang Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial. Yang membedakannya besaran pinjaman untuk bidang Ekonomi, untuk bidang Lingkungan Kegiatan yang dilakukan, jumlah KSM dan untuk bidang sosial jumlah KSM dan kegiatan yang dilakukan tetapi untuk Usaha Bersama Belum mempunyai program untuk di bidang Sosial. Dari kesimpulan dapat dilihat bahwa LKM Usaha Bersama yang bagus dalam mengelola LKM.

- b. Analisis pembukuan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan standar Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan sekretaris LKM yang bernama Endah menyatakan bahwa, LKM Usaha Bersama sudah melakukan pembukuan secara benar dan sesuai dengan standar Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), adanya laporan keuangan secara periodik, membuat buku harian regular, buku kas harian, buku Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Uang LKM), nama KSM yang meminjam dana, Laporan Laba/Rugi dan Neraca.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan unit pengelola ekonomi LKM yang bernama Emiyati menyatakan bahwa, LKM Duku belum melakukan pembukuan secara benar dan

sesuai dengan standar Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), LKM ini hanya membuat laporan pada buku bank LKM, buku pemasukkan dan pengeluaran, nama KSM yang meminjam dana, dan Laporan Laba/Rugi dan Neraca. Belum semua dilakukan dengan benar seperti pedoman PNPM-MP

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan ketua LKM yang bernama Idrus menyatakan bahwa, LKM Ampere belum melakukan pembukuan secara benar dan sesuai dengan standar Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), LKM ini jarang melakukan laporan keuangan secara periodik dikarenakan LKM ini hanya membuat laporan keuangan melalui buku bank LKM, dan membuat laporan dari Laba/Rugi dan Neraca.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa LKM Duku dan Ampere belum melakukan pembukuan secara benar. Karena dalam buku pedoman PNPM-MP laporan keuangan di buat dan di laporkan secara rinci. Dari kesimpulan dapat dilihat bahwa LKM Usaha Bersama yang baik dalam mengelola pembukuan di LKM.

- c. Analisis dana yang tersalur ke Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) tersalur ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tanpa potongan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengurus LKM menyatakan bahwa, Pada LKM Usaha Bersama, LKM Duku

dan LKM Ampera tidak melakukan potongan untuk dana yang di salurkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), tetapi LKM Usaha Bersama, Duku dan Ampera dalam menjalankan programnya mempunyai program Tridaya dalam bidang Ekonominya LKM Usaha Bersama, LKM Duku dan LKM Ampera ini menetapkan potongan dana yaitu sebesar 1,5% perbulan bagi masyarakat yang ingin meminjam dana. Dengan sistem pengembalian tanggung renteng.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa LKM Usaha Bersama, LKM Duku dan Ampera menerapkan sistem yang sama. Yaitu jika ada KSM yang meminjam dana saja yang di berikan potongan sebesar 1,5% perbulan. Dari kesimpulan dapat dilihat bahwa LKM Usaha Bersama, LKM Duku dan LKM Ampera semuanya bagus dalam menyalurkan dana LKM ke KSM tanpa potongan.

- d. Analisis tidak adanya penyalahgunaan dan korupsi baik terhadap Biaya Operasional (BOP) Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) maupun penyaluran dana.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan sekretaris LKM yang bernama Endah menyatakan bahwa, LKM Usaha Bersama tidak mempunyai selisih penggunaan dana karena, dana yang diterima maupun dana yang terasalurkan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Karena dana yang di dapat LKM dan pengalokasiannya di lakukan dengan

benar seperti jika ingin melakukan pembangunan jalan Rabat beton dana yang digunakan sesuai dan tepat sasaran dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan unit pengelola ekonomi LKM yang bernama Emiyati menyatakan bahwa, LKM Duku terdapat selisih karena, dana yang diterima maupun dana yang terasalurkan tidak sepenuhnya dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Karena jika ada kegiatan seperti pembuatan gorong-gorong dana yang digunakan belum sesuai dan belum tepat sasaran dengan yang diharapkan. Dana yang semestinya tersalur semua untuk kepentingan masyarakat tetapi ini digunakan untuk kepentingan lainnya (kepentingan pribadi). Akibatnya masyarakat tidak bisa menikmati fasilitas yang telah di bangun dalam jangka waktu lama.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan ketua LKM yang bernama Idrus menyatakan bahwa, LKM Duku terdapat selisih karena, dana yang diterima maupun dana yang terasalurkan tidak sepenuhnya dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Karena jika ada kegiatan seperti pembuatan drainase masyarakat tidak bisa menikmati fasilitas yang dibuat karena pembuatan tidak lakukan dengan benar. Yang seharusnya penggunaan dalam jangka waktu yang lama ini malah

sebaliknya. Karena dan yang tersalurkan tidak semuanya diberikan untuk pembangunan tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk LKM Duku dan Ampera dana yang di dapat tidak semuanya tersalurkan ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Akibatnya masyarakat tidak bisa menikmati fasilitas yang seharusnya ada dan penggunaannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Dari kesimpulan dapat dilihat bahwa LKM Usaha Bersama yang baik dalam mengelola LKM.

- e. Analisis Penarikan dana dari rekening Bank Lembaga Keswadayaan Masyarakat di tandatangani 3 orang anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengurus LKM menyatakan bahwa, jika ada penarikan dana dari rekening Bank LKM Usaha Bersama, Duku dan Ampera harus di tandatangani oleh anggota LKM Usaha Bersama supaya tidak ada penyelewengan dana 3 orang yang punya wewenang dalam hal ini yaitu, ketua, bagian Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Sekretaris.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa diharapkan untuk LKM mampu menerapkan sistem yang sama karena bisa menghindari dari penyalahgunaan dana dan penyelewengan dana. Dari kesimpulan dapat dilihat bahwa untuk hal ini bagus semua karena

LKM Usaha Bersama, LKM Duku dan LKM Ampera menerapkan sistem yang sama.

**2. Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) Mandiri Perkotaan Pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang.**

- a. Analisis dana yang diterima Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan pengalokasiannya diumumkan kepada masyarakat minimal di 5 papan pengumuman informasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu masyarakat yang bernama Siti menyatakan bahwa, LKM Usaha Bersama dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi Penggunaan Dananya tersalurkan semuanya ke masyarakat dan diumumkan kepada masyarakat melalui papan informasi, laporan seperti yang diatas itu adalah informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat pada saat tanggal 5 di awal bulan dan pengumumannya di tempel di 5 papan informasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu masyarakat yang bernama April Hadi menyatakan bahwa, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi Penggunaan Dana pada LKM Duku tidak semuanya tersalurkan ke masyarakat, mungkin oleh faktor ini dana yang diterima dan pengalokasiannya jarang diumumkan kepada masyarakat yang seharusnya menurut buku

pedoman diumumkan melalui papan informasi dan di sampaikan setiap awal bulan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu masyarakat yang bernama Jailani menyatakan bahwa, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi Penggunaan Dana pada LKM Ampera tidak semuanya tersalurkan ke masyarakat, mungkin oleh faktor ini dana yang diterima dan pengalokasiannya jarang diumumkan kepada masyarakat, dan juga faktor biaya yang menyebabkan pengumuman jarang di tempel. yang seharusnya menurut buku pedoman diumumkan melalui papan informasi dan di sampaikan setiap awal bulan.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa setiap LKM harus mengumumkan dana dan pengalokasiannya kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) agar mereka bisa mengetahui berapa dana yang diterima dan dana yang tersalurkan. Dari kesimpulan dapat dilihat bahwa LKM Usaha Bersama yang bagus dalam mengelola dan dan pengalokasiaannya.

- b. Analisis laporan keuangan ditempel di 5 papan yang strategis dan disampaikan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait setiap tanggal 5 di awal bulan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu masyarakat yang bernama Siti menyatakan bahwa, LKM Usaha Bersama telah melakukan penempelan informasi papan

pengumuman mengenai laporan keuangan dan di sampaikan kepada masyarakat setiap tanggal 5 di awal bulan, masyarakat harus diberitahu mengenai laporan keuangan tersebut agar tidak menimbulkan ke curigan masyarakat terhadap LKM. Jumlah papan yang akan ditempel yaitu, 5 papan informasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu masyarakat yang bernama April Hadi menyatakan bahwa, LKM Duku jarang melakukan penempelan informasi laporan keuangan, di karenakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi Penggunaan Dana pada LKM Duku tidak semuanya tersalurkan ke masyarakat, mungkin oleh faktor ini LKM Duku jarang melakukan penempelan laporan keuangan di papan informasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu masyarakat yang bernama Jailani menyatakan bahwa, LKM Ampera juga jarang melakukan penempelan informasi laporan keuangan, di karenakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Alokasi Penggunaan Dana pada LKM Duku tidak semuanya tersalurkan ke masyarakat, dan kurangnya biaya untuk melakukan penempelan di papan informasi mungkin oleh faktor ini LKM Ampera jarang melakukan penempelan laporan keuangan di papan informasi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk LKM Duku dan Ampera harus rutin melakukan penempelan informasi laporan keuangan

agar masyarakat bisa lebih mudah mengetahui yang dilakukan LKM. Dari kesimpulan dapat dilihat bahwa LKM Usaha Bersama yang bagus, karena laporan keuangan telah dibuat dengan benar.

- c. Analisis Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang termasuk daftar tunggu dan telah mendapat prioritas dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) diumumkan kepada masyarakat minimal 5 papan informasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu masyarakat sekitaran LKM menyatakan bahwa, LKM Usaha Bersama, LKM Duku, LKM Ampera melakukan hal yang sama bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang termasuk daftar tunggu agar bisa mengetahui tugas yang akan dilakukan maka dengan demikian informasi akan disampaikan dengan cara menempel menggunakan 6 papan informasi. Yang terdapat di masing-masing kelurahan.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa LKM Usaha Bersama, LKM Duku dan Ampera melakukan hal yang sama yaitu mengumumkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) agar memudahkan masyarakat untuk melihat apa yang akan mereka kerjakan. Dari kesimpulan dapat dilihat bahwa LKM Usaha Bersama, LKM Duku dan LKM Ampera bagus dalam mengelola LKM.

- d. Analisis Rekening Bank atas nama Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) ditandatangani oleh 3 orang anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu masyarakat sekitaran LKM menyatakan bahwa, Rekening Bank atas nama LKM Usaha Bersama, Duku dan Ampera harus ditandatangani oleh anggota LKM supaya tidak ada penyelewengan, 3 orang yang punya wewenang dalam hal ini yaitu, ketua, bagian Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Sekretaris.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa diharapkan untuk LKM Usaha Bersama, Duku dan Ampera mampu menerapkan sistem ini supaya tidak ada penyelewengan dana dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Dari kesimpulan dapat dilihat bahwa LKM Usaha Bersama, LKM Duku dan LKM Ampera bagus dalam mengelola LKM.

- e. Analisis setiap kegiatan pembangunan dan perbaikan lingkungan dilengkapi dengan papan informasi proyek.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu masyarakat yang bernama Siti menyatakan bahwa, LKM Usaha Bersama untuk setiap kegiatan pembangunan dilengkapi dengan informasi papan proyek yang berisi tentang nama kegiatan, volume kegiatan, nilai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Swadaya Sumber dana lain, tanggal pelaksanaan, dan nama KSM pelaksana.

Begitu juga jika LKM Usaha Bersama melakukan perbaikan lingkungan harus juga di lengkapi nama kegiatan, volume kegiatan, nilai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Swadaya Sumber dana lain, tanggal pelaksanaan, dan nama KSM pelaksana.

Masyarakat juga di ikut sertakan dalam kegiatan ini supaya meningkatkan solidaritas antar masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu masyarakat yang bernama April Hadi dan Jailani , LKM Duku dan LKM Ampera dalam setiap kegiatan yang dilakukan jarang dilengkapi dengan informasi papan proyek. Begitu juga dalam melakukan perbaikan lingkungan jarang di lengkapi dengan informasi papan proyek, karena faktor biaya dan kurang aktifnya anggota LKM.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa, semua LKM harus membuat informasi papan proyek jika ingin melakukan kegiatan dan melakukan perbaikan lingkungan supaya masyarakat mengetahui proyek apa yang dikerjakan, berapa jumlah dananya dan LKM apa yang melakukan. Dari kesimpulan dapat dilihat bahwa LKM Usaha Bersama yang baik dalam mengelola LKM, karena setiap kegiatan pembangunan dan perbaikan lingkungan dilengkapi dengan papan informasi proyek.

Jadi, kesimpulan dari 2 variabel yaitu Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana PNPM-MP dan Analisis Transparansi

Pengelolaan Dana PNPM-MP yang baik dan bagus dalam mengelola LKM ialah LKM Usaha Bersama, karena LKM Usaha Bersama benar-benar menerapkan sistem yang dalam buku pedoman pelaksanaan PNPM-MP.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari hasil analisis penulis untuk Variabel Akuntabilitas dengan indikator :

Analisis Unit Pengelola Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dikelola secara aktif sesuai rencana atau program Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), adanya pengurus dan rutin melakukan pertemuan. Untuk indikator ini LKM Usaha Bersama yang baik dalam mengelola LKM.

Analisis pembukuan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan standar Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Untuk indikator ini LKM Usaha Bersama yang baik dalam mengelola pembukuan di LKM.

Analisis dana yang tersalur ke Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) tersalur ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tanpa potongan. Untuk indikator ini LKM Usaha Bersama, LKM Duku, dan LKM Ampera semuanya bagus dalam menyalurkan dana ke LKM Ke KSM tanpa potongan.

Analisis tidak adanya penyalahgunaan dan korupsi baik terhadap Biaya Operasional (BOP) Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) maupun penyaluran dana. Untuk indikator ini LKM Usaha Bersama yang baik dalam mengelola LKM.

Analisis penarikan dana dari rekening Bank Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di tandatangani 3 orang anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Untuk indikator ini semua LKM bagus karena LKM menerpakan sistem yang sama.

Berdasarkan dari hasil analisis penulis untuk Variabel Akuntabilitas dengan indikator :

Analisis dana yang diterima Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan pengalokasiannya diumumkan kepada masyarakat minimal di 5 papan pengumuman informasi. Untuk indikator ini LKM Usaha Bersama yang bagus dalam mengelola dana dan pengalokasiannya.

Analisis laporan keuangan ditempel di 5 papan yang strategis dan disampaikan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait setiap tanggal 5 di awal bulan. Untuk indikator ini LKM Usaha Bersama yang bagus, karena laporan keuangan telah dibuat dengan benar.

Analisis Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang termasuk daftar tunggu dan telah mendapat prioritas dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) diumumkan kepada masyarakat minimal 5 papan informasi. Untuk indikator ini LKM Usaha Bersama, LKM Duku, dan LKM Ampera bagus dalam mengelola LKM.

Analisis Rekening Bank atas nama Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) ditandatangani oleh 3 orang anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Untuk indikator ini semua LKM bagus dalam mengelola LKM.

Analisis setiap kegiatan pembangunan dan perbaikan lingkungan dilengkapi dengan papan informasi proyek. Untuk Indikator ini LKM Usaha Bersama yang bagus dalam mengelola LKM.

Kesimpulan dari 2 variabel yaitu Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana PNPM-MP dan Analisis Transparansi Pengelolaan Dana PNPM-MP yang baik dan bagus dalam mengelola LKM ialah LKM Usaha Bersama, karena LKM Usaha Bersama benar-benar menerapkan sistem yang dalam buku pedoman pelaksanaan PNPM-MP.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut :

### **1. LKM Usaha Bersama Kelurahan 2 Ilir**

Dari segi Akuntabilitas dan Transparansi diharapkan untuk LKM Usaha Bersama mampu mempertahankan apa yang sudah ada dan sudah diterapkan dalam mengelola LKM. Dan sesuai dengan buku pedoman PNPM-MP.

### **2. LKM Duku Kelurahan Duku**

Dari segi Akuntabilitas diharapkan mampu mengelola LKM secara aktif dan sesuai rencana, menganalisis pembukuan dengan benar dan sesuai dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), mampu menyalurkan dana LKM ke KSM tanpa potongan, diharapkan tidak ada penyalahgunaan dana dan korupsi, dan penarikan dana dari Rekening Bank LKM harus ditandatangani 3 orang anggota LKM.

Dari segi Transparansi diharapkan mampu mengumumkan dana yang diterima maupun pengalokasiannya, laporan keuangan harus ditempel dan disampaikan kepada masyarakat, bagi KSM yang termasuk daftar tunggu harus diumumkan di papan informasi, Rekening Bank atas nama LKM harus di tandatangani 3 orang anggota LKM, dan setiap ada kegiatan pembangunan dan perbaikan lingkungan di harapkan mampu dilengkapi dengan papan informasi proyek.

### 3. LKM Ampera Kelurahan 3 Ilir

Dari segi Akuntabilitas diharapkan mampu megelola LKM secara aktif dan sesuai rencana, menganalisis pembukuan dengan benar dan sesuai dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), mampu menyalurkan dana LKM ke KSM tanpa potongan, diharapkan tidak ada penyalahgunaan dana dan korupsi, dan penarikan dana dari Rekening Bank LKM harus ditandatangani 3 orang anggota LKM.

Dari segi Transparansi diharapkan mampu mengumumkan dana yang diterima maupun pengalokasiannya, laporan keuangan harus ditempel dan disampaikan kepada masyarakat, bagi KSM yang termasuk daftar tunggu harus diumumkan di papan informasi, Rekening Bank atas nama LKM harus di tandatangani 3 orang anggota LKM, dan setiap ada kegiatan pembangunan dan perbaikan lingkungan di harapkan mampu dilengkapi dengan papan informasi proyek

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. **Akuntansi Dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah**, Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Ani 2009. **"Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana PNPM-MP Mandiri Perkotaan (Studi Kasus Pada BKM Sembilan Rangkai Kelurahan 5 Ulu Kota Palembang)." Skripsi Tidak Dipublikasikan**, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Arifin Sabeni dan Imam Ghazali. 2007. **Akuntansi Pemerintah Indonesia**, Penerbit Ganesa. Jakarta.
- Budi Yuwono P. 2010. **Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan**, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya. Jakarta.
- Fitri 2009. **"Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana PNPM Mandiri (Studi Kasus pada BKM Sehati Kelurahan Sukarami Kota Palembang)." Skripsi Tidak Dipublikasikan**, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Ellwood. 2009. **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Hariyoso, S. 2007. **Pembaharuan Birokrasi dan Kebijakan Publik**. Jakarta: Peradaban.
- Imam Ghazali. 2007. **Akuntansi Pemerintah Indonesia**, Penerbit Ganesa. Jakarta.
- Nurindrianto dan Bambang Supomo. 2009 **Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen**, BEF, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009 **.Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012 **Metode Penelitian Administrasi**, Penerbit CV Alfabeta Bandung.
- The World Bank Group, 2013 **Unit Penanganan Keluhan PNPM Usaha untuk meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas di Indonesia**.
- Tim Koordinasi PNPM Mandiri, 2014. **Buku Pedoman PNPM Mandiri**. Jakarta.

Vivi 2012. **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana PNPM Mandiri (Studi Kasus Pada BKM BETUL Kota Malang).”** *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang.

**7. Jadwal Penelitian**

**Tabel 4  
Jadwal Penelitian**

Keterangan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Survei Pendahuluan			■	■	■	■																		
Proposal UP							■																	
Konsultasi Proposal UP							■	■	■	■														
Seminar UP												■												
Perbaikan UP													■											
Pengambilan Data														■	■									
Pengolahan Data															■	■								
Analisis Data																	■	■						
Penggandaan Skripsi																		■	■					
Ujian Komprehensif																							■	■

Sumber: Penulis, 2015



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA : <b>Aldila Ira Meutia</b>	PEMBIMBING
NPM : <b>22 2011 252</b>	KETUA <b>Welly, S.E, M.Si</b>
PROGRAM STUDI : <b>Akuntansi</b>	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : <b>Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dana Program nasional Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang</b>	

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
26/6/2015	BAB I a/d III	<i>[Signature]</i>		Perbaiki
30/6/2015	BAB I a/d III	<i>[Signature]</i>		Perbaiki
3/7/2015	BAB I a/d III	<i>[Signature]</i>		Acc
3/7/2015	BAB IV a/d V	<i>[Signature]</i>		Perbaiki
7/7/2015	BAB IV a/d V	<i>[Signature]</i>		Perbaiki
13/7/2015	BAB IV a/d V	<i>[Signature]</i>		Perbaiki
14/7/2015	BAB IV a/d V	<i>[Signature]</i>		Perbaiki
22/7/2015	BAB IV a/d V	<i>[Signature]</i>		Acc lengkap

**TATAN :**

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang  
 Pada tanggal : / /  
 a.n. Dekan  
 Program Studi  
  
**Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si**

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI  
 INSTITUSI PERGURUAN TINGGI  
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)  
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)  
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)  
 Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 (B)  
 Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)  
 Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

umpalembang.ac.id

Email : febumplg@umpalembang.ac.id

mat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

ri / Tanggal : Sabtu, 08 Agustus 2015  
 aktu : 08.00 s/d 12.00 WIB  
 ma : Aldila Ira Meutia  
 M : 22 2011 252  
 ogram Studi : Akuntansi  
 ata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik  
 ul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) PADA LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT (LKM) KECAMATAN ILIR TIMUR 2 PALEMBANG

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN  
 PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN  
 UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN.	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Welly, S.E, M.Si	Pembimbing	25 / 8 / 2015	
2	Betri, S.E, M.Si, Ak., CA	Ketua Penguji	24 / 8 2015	
3	Muhammad Fahmi, S.E, M.Si	Penguji I	24 / 8 / 2015	
4	Welly, S.E, M.Si	Penguji II	22 / 08 / 2015	

Palembang, Agustus 2015

Dekan  
 a.b Ketua Program Studi Akuntansi



**Rosalina/Ghozali, SE, Ak. M.Si**  
 NIDN/NBM : 0228115802/1021960

**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**KECAMATAN ILIR TIMUR II**

Jalan Yos Sudarso No.01 Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon (0711) 710042 Faksimile (0711) 710042 Kode Pos : 30116  
Website : [www.ilirtimur2.palembang.go.id](http://www.ilirtimur2.palembang.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/ 370 /06/VII/2015

g bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : **RUSMEIDI SAPUTRA, S.STP, M.Si**  
**Jabatan** : **Sekretaris Camat Ilir Timur II Kota Palembang**

dasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang,  
nor : 070/1078/BAN.KBP/2015 tanggal 08 Juni 2015. Dengan ini  
erangkan bahwa :

Nama : Aldira Ira Meutia  
NIM : 222011252  
Fakultas : Ekonomi  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Palembang

ang benar telah melakukan pengambilan data secara langsung mengenai  
gram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) pada  
amatan Ilir Timur II Palembang selama periode 08 Juni 2015 s.d. 08 Juli 2015.  
gan catatan sesuai dengan pernyataan yang bersangkutan bahwa data  
ebut hanya digunakan untuk kepentingan akademik saja.

ikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 10 Juli 2015

**KECAMATAN ILIR TIMUR II PALEMBANG**  
**SEKRETARIS**



**RUSMEIDI SAPUTRA, S.STP, M.Si**  
**NIP. 198005241998101002**



# Sertifikat

250/J-10/FEB-UJP/SHAVII/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

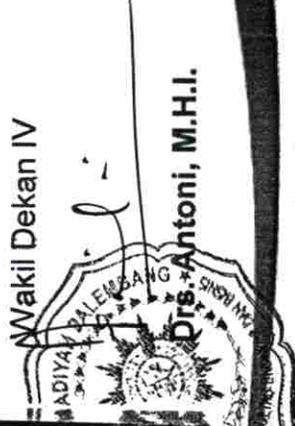
NAMA : ALDILA IRA MEUTIA  
NIM : 222011252  
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (22) Surat Juz Amma  
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang



Palembang, 03 Juli 2015  
an. Dekan

Wakil Dekan IV



Drs. Antoni, M.H.I.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Aldila Ira Meutia  
 Place/Date of Birth : Margamulya, Nov 03rd 1993  
 Test Times Taken : +2  
 Test Date : July 27th, 2015

*Scaled Score*

Listening Comprehension : 50  
 Structure Grammar : 37  
 Reading Comprehension : 52  
 OVERALL SCORE : 463



Palembang, July 26<sup>th</sup>, 2015  
Head of Language Institute

*Rini Susanti*  
Rini Susanti, S.Pd.,M.A

No. 332/TEA FE/LEB/UMP/VII/2015

CERTIFICATE

NBM/NIDN. 1164932/0210098402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
STATUS TERAKREDITASI

جامعة محمدية  
**PIAGAM**

No. 259/H-4/LPKKN/UMP/IX/2014

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang  
menerangkan bahwa :

Nama : **ALDILA IRA MEUTIA**  
Nomor Pokok Mahasiswa : 222011252  
Fakultas : Ekonomi  
Tempat Tgl: Lahir : MARGAMULYA, 03-11-1993

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-7 yang dilaksanakan dari tanggal  
16 Juli sampai dengan 02 September 2014 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Rejodadi  
Kecamatan : Sembawa  
Kota/Kabupaten : Banyuasin  
Dinyatakan : LULUS

Mengetahui  
Rektor

  
**Dr. W. Idris, S.E., M.Si.**

  
Palembang, 15 September 2014  
Ketua LPKKN-UMP  
**Dr. Alhanannasir, M.Si.**



# FAKULTAS EKONOMI LABORATORIUM KOMPUTER

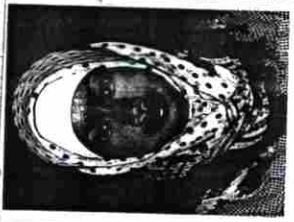
## SERTIFIKAT

Nomor : 0125/G-15 / LAB.. FE UMP / VIII / 2012

Diberikan Kepada :

Nama : ALDILA IRA MUSTIA  
 Nim : 222011252  
 Tempat Lahir : MARGA MULA  
 Tanggal Lahir : 03 NOVEMBER 1993  
 Nilai : 80 A SANGAT MEMUASKAN

Peserta Pelatihan Komputer Windows, Microsoft Word dan Microsoft Excel yang dilaksanakan dari bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 (24 Kali: 28 Jam) bertempat di Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang



Palembang Agustus 2012  
 Dekan

M. Taufiq Syamsuddin., S.E., Ak., MSI

## **BIODATA PENULIS**

Nama : Aldila Ira Meutia  
NIM : 22 2011 252  
Tempat/Tanggal Lahir : MargaMulya, 03 November 1993  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Amula Rahayu Lubuklinggau Selatan 2 Rt. 2 Rw.  
03 No. Kode Pos 31626  
No. Handphone : 0878-9809-7429  
Email : aldilatia@yahoo.co.id  
Nama Orang Tua  
Bapak : Drs. Abdul Ajis  
Ibu : Indra Rivita S.H  
Pekerjaan Orang Tua  
Bapak : Karyawan Swasta  
Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Jl. Amula Rahayu Lubuklinggau Selatan 2 Rt. 2 Rw.  
03 No. Kode Pos 31626

Palembang, Agustus 2015  
Penulis,

**(Aldila Ira Meutia)**